

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan pemelihara ketertiban umum (*order maintenance*). Polri sebagai lembaga yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur merencanakan dan membiayai dirinya sendiri (Rahardjo, 2002). Pelaksanaan tugas dalam Polri secara umum terbagi dalam lima fungsi kepolisian, yaitu fungsi intelijen, fungsi reserse, fungsi sabhara, fungsi lalu lintas dan fungsi bimbingan masyarakat. Pada fungsi sabhara terdapat fungsi dalmas yang memiliki fungsi sebagai pengawal sekaligus pengamanan aksi unjuk rasa sebagai tindakan preventif kepolisian. Melayani masyarakat merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan aparat kepolisian. Tugas ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Menurut djatmika (1996) dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, seorang polisi harus mampu menahan perasaannya, sanggup menahan egonya, sehingga orang yang dilayani merasa senang, puas dan merasa dihormati. Begitu pula dengan pelaksanaan unjuk rasa yang memiliki hak perlindungan hukum dan mengeluarkan pikiran secara bebas (UU no. 9 Tahun 1998) yang memerlukan penanganan dari polri khususnya pelayanan oleh dalmas. Pengendalian massa (dalmas) adalah bagian dari tugas polisi yang merupakan suatu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh dari pihak tertentu atau provokator (Sutanto, 2004). Salah satu gangguan kambitas yang menjadi fokus perhatian Polri saat ini, adalah bagaimana menangani kejahatan atau gangguan kamtibmas yang dilakukan secara massal. Kejahatan dengan melibatkan pelaku dalam jumlah yang sangat besar sampai mencapai ribuan

seperti unjuk rasa, penjarahan massal, rusuh massal, perkelahian antar kelompok, pembalakan liar, penambangan liar, isu sara, eksekusi obyek sengketa, penggusuran pemukiman liar dan sebagainya. Mengapa demikian, karena gangguan keamanan seperti tersebut di atas mempunyai spectrum ancaman faktual dan dampak sosial yang luas, juga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan merongrong kewibawaan negara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena investor asing takut menanamkan modalnya di negara yang keamanannya tidak terjamin.

Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta bukanlah sekedar sebagai pusat pemerintahan ibukota Negara Republik Indonesia, Kota Jakarta juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Posisi yang sangat strategis ini membuat Kota Jakarta menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Jakarta juga merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan wilayah di sekitarnya. Kawasan yang semula hanya sebuah kota kecamatan berkembang menjadi kota satelit yang berfungsi sebagai kota penyanggah Jakarta. Ada tujuh wilayah penyanggah yang mengelilingi Kota Jakarta, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Depok, Bogor, Cianjur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Setiap hari penduduk wilayah penyanggah melakukan aktivitas di Kota Jakarta. Sedangkan wilayah yang termasuk wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Situasi Jakarta sebagai pusat pemerintahan menjadikan Jakarta sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi dari penduduk Jakarta maupun luar Jakarta kepada pemerintah atau instansi yang dituju secara langsung. Istana Negara, DPR/MPR RI, kantor pemerintahan dan pusat-pusat bisnis yang berada di Jakarta menjadi tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah untuk langsung ke pemerintah pusat. Jumlah yang besar dan sifat unjuk rasa yang bervariasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan eskalasi unjuk rasa mengarah kearah anarkhi. Jumlah yang

Universitas Bhayangkara Jaya

besar akan sulit untuk mengatur dan mengendalikan massa agar dapat diarahkan untuk berjalan tertib dan aman. Sifat unjuk rasa yang bervariasi dari yang hanya menyampaikan aspirasi dengan pengeras suara, pembakaran ban atau spanduk, treatikal hingga pelemparan-pelemparan benda-benda berbahaya dapat menimbulkan efek bagi satu sama lain pengunjung rasa dari berbagai kelompok yang berbeda.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang tidak bisa diprediksi serta tidak memiliki batas waktu yang jelas. Diibaratkan seperti “menjemput bola”, setiap saat masyarakat membutuhkan bantuan polisi, maka polisi harus siap. Orang-orang yang dihadapi polisipun berasal dari berbagai macam golongan dengan status dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan-kepentingan golongan dalam masyarakat sendiri sering kali saling berbenturan (Rahardjo, 2002). Situasi ini membuat polisi selalu dihadapkan pada suatu dilema dasar. Adanya kenyataan bahwa, karena polisi harus menegakkan peraturan maka pasti ada pihak yang diuntungkan dan dalam waktu bersamaan pasti ada yang merasa dirugikan. Kondisi kerja yang kurang menguntungkan di atas dapat menjadi sumber kecemasan bagi anggota polisi khususnya polisi yang belum memiliki pengalaman atau baru lulus pendidikan.

Polisi secara pribadi juga memiliki perasaan cemas, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Namun polisi tetap dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dan memiliki kemampuan pengendalian diri, artinya dalam keadaan apapun, harus dapat mengendalikan diri. Sikap tersebut sesuai dengan semangat juang polri yang tertantum dalam Tri Batra dan Catur Prasetya. Ketika jumlah dan sifat unjuk rasa yang semakin tidak dapat dikendalikan, seperti kasus di depan kedubes AS 17 september 2012 dengan jumlah yang tidak seimbang dengan anggota dalmas memicu kecemasan tidak dapat mengimbangi kekuatan massa. Yang akhirnya bentrok dan 3 anggota dalmas terluka (skalanews.com 17/9/2012). Perlakuan massa terhadap pasukan dalmas di lapangan dapat berupa ejekan, caci maki dengan kata-kata kotor hingga berbentuk kontak fisik, seperti mendorong dan mendesak pasukan dengan kekuatan massa, pelemparan batu, pelemparan telur busuk atau tomat busuk dan kotoran, pelamparan bom Molotov (bondet), merusak

barikade dan kendaraan petugas, membakar perlengkapan unjuk rasa, melakukan pemukulan dengan benda tajam dan benda keras lainnya. Perlakuan tersebut dapat berakibat terjadinya korban luka berat dan ringan, bahkan yang fatal dapat menimbulkan kematian pada pasukan dalmas sebagaimana yang telah dicontohkan di atas. Disamping dapat berakibat secara fisik, agresi massa juga dapat berakibat secara psikologis kepada pasukan dalmas yaitu rasa cemas dan takut. Maramis (1995) menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu ketegangan, rasa tidak aman, kekhawatiran, yang timbul karena dirasakan akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Bagi anggota dalmas kecemasan bisa timbul akibat adanya situasi terjepit ketika bentrok dengan massa atau dalam pelaksanaan tugasnya mengalami gangguan seperti pengertian kecemasan sebagai perasaan terjepit atau terancam, ketika terjadi konflik yang menguasai ego (Boerre, 2005).

Melihat kondisi Jakarta yang tiada hari tanpa demo (kasubdit dalmas), anggota dalmas Polda Metro Jaya dituntut 24 jam siap melayani kegiatan yang dilakukan masyarakat. Karena situasi yang tak terduga bisa terjadi kapanpun di seluruh kawasan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagai contoh tawuran warga, perkelahian antar kelompok, pertunjukan musik dan kegiatan lainnya yang terjadi malam haripun menuntut kehadiran anggota dalmas untuk bertugas menjaga keamanannya. Anggota dalmas Polda Metro Jaya terbagi 9 kompi dan diantara kompi tersebut terdapat kompi yang di cadangkan selama 24 jam. Dan pada tahun 2013 ini dalmas Polda Metro Jaya mendapat anggota baru yang merupakan anggota baru lulus dari lembaga pendidikan SPN Lido yang disebut Baja (Bintara Remaja). Anggota dalmas yang siaga 24 jam ini lebih berpotensi menghadapi massa lebih banyak dan lebih sering. Bagi anggota yang baru lulus dari lembaga pendidikan atau baja masih sangat minim tentang pengalaman menghadapi massa. Sedangkan anggota yang baru lulus telah mendapatkan banyak pelatihan dan pengetahuan mengenai bagaimana penanganan unjuk rasa dari dalmas awal (massa yang bersifat damai) hingga yang bersifat anarkhi (dalmas lanjut). Walaupun massa bersifat anarkhi, anggota dalmas dituntut tetap bertahan dan tidak terpancing oleh suasana provokasi massa. Kemampuan pengendalian

diri (*self control*) diberikan secara teoritis maupun dipraktikkan di lapangan sehingga diharapkan anggota polisi yang lulus kelak dapat menghadapi massa yang bervariasi dengan aman. Namun tidak bisa dipungkiri situasi massa yang jumlah besar menimbulkan situasi anarkhi yang menimbulkan kecemasan bagi anggota dalmas khususnya yang baru karena situasi latihan berbeda dengan kenyataan yang akan mengganggu pelaksanaan tugas fungsi pengendalian massa berupa mundur dari barisan, pecahnya formasi dalmas, terprovokasi massa bahkan mengakibatkan kemalasan untuk bertugas menghadapi massa seperti tidak masuk dengan alasan sakit (pusing, sakit perut atau meriang) atau tidak ikut pengamanan unjuk rasa karena mual atau sakit kepala.

Bagi anggota yang baru akan merasa bingung dan takut ketika melihat situasi massa yang berbeda waktu diadakan pelatihan. Berbagai tekanan, bahaya dan tuntutan fungsi pengendalian massa diperlukan kemampuan *self control* yang baik untuk mengurangi rasa kecemasan yang ditimbulkannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yaacov Trope dkk dari tel Aviv Univ., Israel (Trope, 2000) tentang penggunaan *Self control* secara aktif untuk mengatasi godaan atau gangguan. Setiap individu dalmas memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku dalam menjalankan tugasnya yaitu pengendalian diri (*Self control*). Goldfried dan Merbaum (dalam Lazarus 1976) juga mengartikan pengendalian diri sebagai suatu kesempatan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi positif. Dengan pengendalian diri diharapkan memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan unjuk rasa oleh semua lapisan masyarakat. Pendapat Chaplin, *Self control* adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan atau merintangai impuls-impuls atau tingkahlaku impulsive (kamus psikologi, 2008). Sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri (*Self control*) satu individu dengan individu lain tidaklah sama. Ada individu yang memiliki kontrol diri tinggi atau baik dan ada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah atau tidak baik. Ketika berinteraksi dengan orang lain ataupun

pengunjuk rasa, seseorang khususnya anggota dalmas akan berusaha menampilkan perilaku yang dianggap paling tepat bagi dirinya yaitu perilaku yang dapat menyelamatkan interaksinya dari akibat negative yang disebabkan karena respon yang dilakukannya ketika menjaga pengunjuk rasa. Kontrol diri (*Self control*) diperlukan guna membantu individu dalam mengatasi berbagai hal yang merugikan yang mungkin terjadi. Calhoun dan Acocella (1995) mengemukakan alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri secara terus-menerus, pertama dalam berkelompok harus dapat mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kedua, pengontrolan diri diperlukan dalam proses pencapaian yang lebih baik agar tidak melakukan penyimpangan. Individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengubah kejadian yang tidak tenang menjadi aman serta menjadi agen utama dalam mengarahkan dan mengatur perilaku utama yang membawa kepada dampak positif, sedangkan yang kemampuan mengendalikan dirinya rendah tidak mampu mengatur dirinya sehingga dapat menjadi pemicu kondisi yang tidak diharapkan bersama (Rahardjo, 2002).

Oleh karena itu, bagi peneliti sangatlah menarik untuk meneliti *self control* pada anggota dalmas polda metro jaya yang baru. Keterkaitan resiko dan bahaya yang akan dihadapi pada anggota dalmas polda metro dalam menghadapi massa yang anarkhi, peneliti merasa perlu meneliti faktor-faktor *self control* apa saja yang dapat mengurangi kecemasan anggota dalmas dalam bertugas menghadapi massa. Anggota dalmas yang memiliki kemampuan mengendalikan perilaku, kemampuan dalam mengendalikan stimulus yang tidak diinginkan, kemampuan dalam mengantisipasi kejadian atau peristiwa, kemampuan dalam menafsirkan peristiwa dan kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan sosok yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas fungsinya sebagai pelayan masyarakat khususnya penjagaan massa.

Dalmas adalah tugas yang penuh dengan resiko dan bahaya yang mengakibatkan stressfull. Stress adalah salah satu faktor timbulnya kecemasan. Berdasarkan konsep salah satu faktor yang dapat mengelola stress adalah *self control*. Namun, sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian

dalam konteks kerja dalmas. Hal inilah yang menjadikan peneliti berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara *self control* dengan kecemasan pada polisi fungsi dalmas polda metro jaya.

1.2. Identifikasi Masalah

Thompson (1994) mengartikan kontrol diri sebagai suatu keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui tindakan diri sendiri. Sedangkan Maramis (1995) menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu ketegangan, rasa tidak aman, kekhawatiran, yang timbul karena dirasakan akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Pengendalian massa (dalmas) adalah bagian dari tugas polisi yang merupakan suatu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh dari pihak tertentu atau provokator (Sutanto, 2004).

Seperti halnya diuraikan di atas bahwa polri khususnya di daerah hukum wilayah Polda Metro jaya juga berfokus untuk mengatasi masalah kamtibmas yang bersifat massal. Perlakuan yang biasanya terjadi oleh massa terhadap anggota polri khususnya dalmas sebagai tugas pokoknya dapat berupa ejekan dengan kata-kata kotor, pendorongan barikade, pelemparan benda-benda berbahaya, pemukulan bahkan kontak fisik yang menggunakan benda tumpul bahkan senjata tajam. Eskalasi massa yang bertambah pun dapat mengarahkan massa kearah anarkhi. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan petugas dalmas di lapangan dan membuat kondisinya terjepit bahkan dapat menghilangkan nyawanya. Hal ini memicu timbulnya ketakutan bahkan kecemasan dalam melaksanakan tugasnya. Kecemasan dapat diukur dengan melihat gejala-gejala umum kecemasan yaitu melalui aspek fisiologis dan psikologis (Conley, 2006). Tuntutan tugas dalmas sebagai pengawal dan pejagaan kegiatan masyarakat agar berjalan aman dan tertib dalam keadaan apapun maka Anggota dalmas harus memiliki kemampuan mengendalikan perilaku, kemampuan dalam mengendalika stimulus, kemampuan dalam mengantisipasi kejadian atau peristiwa, kemampuan dalam menafsirkan

Universitas Bhayangkara Jaya

peristiwa dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan aspek dari *Self control*.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian tentang “ Hubungan Antara *Self control* Dengan Kecemasan Pada Polisi Fungsi Dalmas Polda Metro Jaya”, peneliti membatasi masalahnya dengan menjelaskan tentang kemampuan *Self control* atau pengendalian diri yang dimiliki anggota dalmas Polda Metro Jaya meliputi kemampuan mengendalikan perilaku, kemampuan dalam mengendalikan stimulus, kemampuan dalam mengantisipasi kejadian atau peristiwa, kemampuan dalam menafsirkan peristiwa dan kemampuan dalam mengambil keputusan serta kepercayaan orang lain. Selain hal tersebut peneliti juga membatasi masalah kecemasan yang dimiliki anggota dalmas Polda Metro Jaya melalui aspek fisiologis dan psikologisnya. Sedangkan sampel yang akan dijadikan objek penelitian adalah Bintara remaja anggota dalmas Polda Metro Jaya yang berpangkat brigadir sebagai barisan terdepan, dicadangkan piket 24 jam yang lebih sering menghadapi atau bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan massal di wilayah hukum Jakarta dan merupakan anggota yang baru lulus dari lembaga pendidikan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara *self control* dengan kecemasan pada polisi fungsi pengendalian massa polda metro jaya?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan serta sumbangan efektif antara *self control* dengan kecemasan pada polisi fungsi dalmas khususnya di polda metro jaya yang memiliki wilayah hukum paling kompleks.

1.6. Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis : untuk mengetahui penerapan konsep *self control* dengan kecemasan pada konteks kerja polisi fungsi pengendalian massa di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berada di propinsi DKI Jakarta.
- Manfaat praktis : Penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari dan memahami lebih jauh mengenai hubungan antara pengendalian diri (*self control*) yang dimiliki anggota Polri khususnya bagian pengendalian massa yang bertugas di Polda Metro Jaya dengan kecemasan mereka ketika bertugas. Selain itu, dengan mengetahui hubungan antara *self control* dengan kecemasan pada anggota polisi fungsi dalmas, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan dan kesatuan Polda Metro Jaya untuk mempertimbangkan kemampuan pengendalian diri untuk menekan kecemasan ketika sedang melaksanakan tugas.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari 3 bagian yang tiap bagiannya terdiri dari sub-sub bagian.

1. Bab 1 berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan pengertian, faktor yang mempengaruhi, ciri atau aspek mengenai *self control* dan kecemasan serta polisi fungsi pengendalian massa dan terdapat hubungan antara *self control* dan kecemasan polisi fungsi pengendalian massa beserta kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, identifikasi variable penelitian, definisi konseptual dan operasional, populasi dan pengambilan sampel, metode pengambilan data, metode analisis instrumen dan analisis data.
4. Bab 4 tentang laporan penelitian menjelaskan tentang orientasi kancan penelitian, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasan
5. Bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran

